



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Telepon. (021) 3843348 Faksimile (021) 3810361  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 01/BUA.UKPBJ/PL1.1/II/2026

Jakarta, 06 Februari 2026

Sifat : Terbatas

Lampiran :-

Hal : Percepatan Pengadaan Barang/Jasa

T.A. 2026

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
  2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Para Sekretaris Ditjen Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

di –

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 28172/SEK/SK.PL1.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2026, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar mengidentifikasi dan menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing satuan kerja serta mengumumkannya melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengajukan usulan Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara tender/tender cepat/seleksi/penunjukan langsung/e-purchasing (mini kompetisi) melalui e-Prima dengan alamat <https://e-prima.mahkamahagung.go.id>;
3. Penunjukan Pokja Pemilihan merupakan kewenangan Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI berdasarkan penilaian rekam jejak aparatur yang diusulkan;
4. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, wajib mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing/kompetitif,

adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.